



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 13 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

UNIT KERJA : UNIVERSITAS HASANUDDIN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : TAKDIR TAHIR
2. Jabatan : WAKIL DEKAN BIDANG KEMITRAAN, RISET, INOVASI, DAN ALUMNI
3. NHK : 869694

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 535.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 88 m2/88 m2 di KAB / KOTA KOTA MAKASSAR , HASIL SENDIRI Rp. 425.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 87 m2/87 m2 di KAB / KOTA GOWA, HASIL SENDIRI Rp. 110.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 162.000.000

1. MOBIL, NISSAN LIVINA GRAND LIVINIA 1.5 XV Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000
2. MOTOR, SUZUKI TUNDER 125 Tahun 2006, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000
3. MOBIL, INNOVA MINI BUS Tahun 2005, HASIL SENDIRI Rp. 40.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 12.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 24.943.322

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 733.943.322

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 733.943.322

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpnp.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpnp.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.